



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)





KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57 JAKARTA PUSAT 10440 TELEPON +62-021-3905876, 3905877, 3906178
FAKSIMILE +62-021-31903755, WEBSITE: www.komisiyudisial.go.id, EMAIL: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor : /SET/PR.07.03/02/2015 Februari 2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Komisi Yudisial RI
Tahun 2014

Kepada Yth.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5518/DI.PAN-RB/12/2014 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja K/L tahun 2015, dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2014. Sedangkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2015 masih dalam proses penyusunan dan akan kami sampaikan kemudian.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris Jenderal,

Danang Wijayanto
NIP 19620402 198203 1 001



KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2014 telah selesai disusun.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara jelas menegaskan bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja, perlu adanya pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Dalam laporan kinerja ini disajikan pencapaian Sasaran Kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2014, yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja dengan focus pada pencapaian tujuan/sasaran strategis. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak, stakeholders, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Komisi Yudisial selama Tahun 2014.

Akhirnya, dengan komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh, Komisi Yudisial terus berupaya meningkatkan kinerja dengan baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Yudisial. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi masukan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini. Seiring dengan hal tersebut, selain menjadi media pertanggungjawaban kinerja, semoga laporan ini dapat menjadi parameter Komisi Yudisial untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2015
Sekretaris Jenderal,

Danang Wijayanto
NIP 19620402 197507 1001



DAFTAR ISI



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Grafik	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	4
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	8
B. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	
	52
Lampiran:	
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 43/SET.KY/PR.05.01/01/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2014	
2. Penetapan Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2014	
3. Pengukuran Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2014	

DAFTAR TABEL

		Halaman	
TABEL	1	Indikator dan Target Kinerja Tahun 2014	5
	2	Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014	8
	3	Tingkat Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran 1 tahun 2014	9
	4	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Anggaran Yang Diproses Dengan Tepat Waktu Dan Akurat	10
	5	Jumlah Dokumen kepegawaian yang Tersusun Tepat waktu	11
	6	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Dan Akuntansi Yang Diproses Dengan Tepat Waktu Dan Akurat	13
	7	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Yang Disusun Dengan Tepat Waktu Dan Akurat	15
	8	Penilaian Hasil Kinerja Pegawai	18
	9	Opini Laporan Komisi Yudisial	19
	10	Jumlah Penyusunan Buku Dan Berbagai Bentuk Publikasi Informasi Di Bidang Yudisial	21
	11	Jumlah Pengunjung <i>Website</i> Komisi Yudisial Tahun 2014	23
	12	Jumlah Rata-Rata Pengunjung <i>Website</i> KYRI Per Hari Tahun 2011-2014	24
	13	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2014	24
	14	Hasil Survey terhadap Kepuasan terhadap Sarana dan Prasarana yang Tersedia	25
	15	Tingkat Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran 3 Tahun 2014	26
	16	Jumlah Hakim Agung Yang Lulus Seleksi Tahun 2006-2014	30
	17	Jumlah Peserta Pelatihan Kapasitas Hakim Tahun 2013-2014	31
	18	Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat Tahun 2010-2014	35
	19	Jumlah Laporan Masyarakat Yang Ditangani Hingga Tuntas (Berdasar Hasil Sidang Pleno) Tahun 2013-2014	35
	20	Klasifikasi Kasus Dan Laporan Hasil Investigasi Tahun 2014	36
	21	Capaian Kinerja Rata-Rata Sasaran Strategis Tahun 2014	38
	22	Capaian Kinerja Rata-Rata Sasaran Strategis Tahun 2011-2013	39
	23	Alokasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2014 Berdasarkan Program Dan Kegiatan	41
	24	Alokasi Dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun 2014	42
	25	Realisasi Anggaran Tahun 2010-2014	44

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
GAMBAR	I Struktur Organisasi Komisi Yudisial (Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013)	3
	2 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012)	4

DAFTAR GRAFIK

			Halaman
GRAFIK	1	Hasil Polling “Bagaimana Kinerja Komisi Yudisial Sekarang Ini?”	19
GRAFIK	2	Jumlah Kunjungan Website Komisi Yudisial (Per Bulan) Tahun 2014	23



PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan diperluas melalui Paket Undang-Undang Badan Peradilan yang memberikan wewenang Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Penguatan wewenang Komisi Yudisial selanjutnya dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 yang secara substansial perubahan UU tersebut memperkuat kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 13 yang berbunyi “Komisi Yudisial mempunyai wewenang”: a) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Adhoc di MA kepada DPR untuk mendapat persetujuan; b) Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim; c) Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim”.

Pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 sepenuhnya mengacu pada wewenang dan tugas yang diberikan oleh undang-undang tersebut sehingga dalam periode pembangunan jangka menengah lima tahunan (Renstra) 2010-2015, KY melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya guna mengakomodir dan mengimplementasikan amanat UU Nomor 18/2011. Pelaksanaan amanat UU tersebut menjadikan KY memiliki peran strategis dalam kontribusinya dibidang penegakkan hukum yang diwujudkan melalui akselerasi pelaksanaan program kegiatan, penguatan kelembagaan serta optimalisasi partisipasi publik.

Tahun 2014 menjadi tahun akhir periode pembangunan jangka menengah 2010-2014, dalam tahun ini, teridentifikasi isu strategis yang menjadi fokus perhatian Komisi Yudisial untuk diupayakan pemecahan bersama dengan para pemangku

kepentingan, yaitu terkait: 1) Keterbatasan jumlah calon hakim agung potensial yang memenuhi persyaratan dan berminat diusulkan untuk mengikuti seleksi calon hakim agung, serta pembatasan dua kali berturut-turut bagi pendaftar CHA mengakibatkan pendaftar lama tidak dapat mendaftar kembali sehingga jumlah pendaftar berkurang. Keterbatasan jumlah pendaftar calon hakim agung berdampak pada sulitnya Komisi Yudisial dalam memenuhi rasio 1:1 (1 calon hakim agung untuk setiap 1 posisi hakim agung di MA) dalam hal pengajuan calon hakim agung ke DPR; 2) Seleksi Pengangkatan Hakim hingga saat ini masih belum dapat dilaksanakan karena belum ditetapkannya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Seleksi Hakim dan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Peserta Pendidikan Hakim. Sementara dari aspek internal organisasi, isu strategis yang teridentifikasi adalah masih kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial.

Laporan kinerja Komisi Yudisial Tahun 2014 merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan perencanaan strategisnya. Memposisikan indikator kinerja sebagai parameter keberhasilan yang diukur pencapaiannya setiap tahun, termasuk ukuran capaian keberhasilan KY dalam periode pembangunan 2010-2014, khususnya pada tahun 2014 untuk menilai kinerja tahun 2014 dengan turut memperhatikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hasil pengukuran kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar dalam melakukan perencanaan kinerja pada periode pembangunan jangka menengah 2015-2019 dan sebagai bentuk akuntabilitas KY kepada publik.

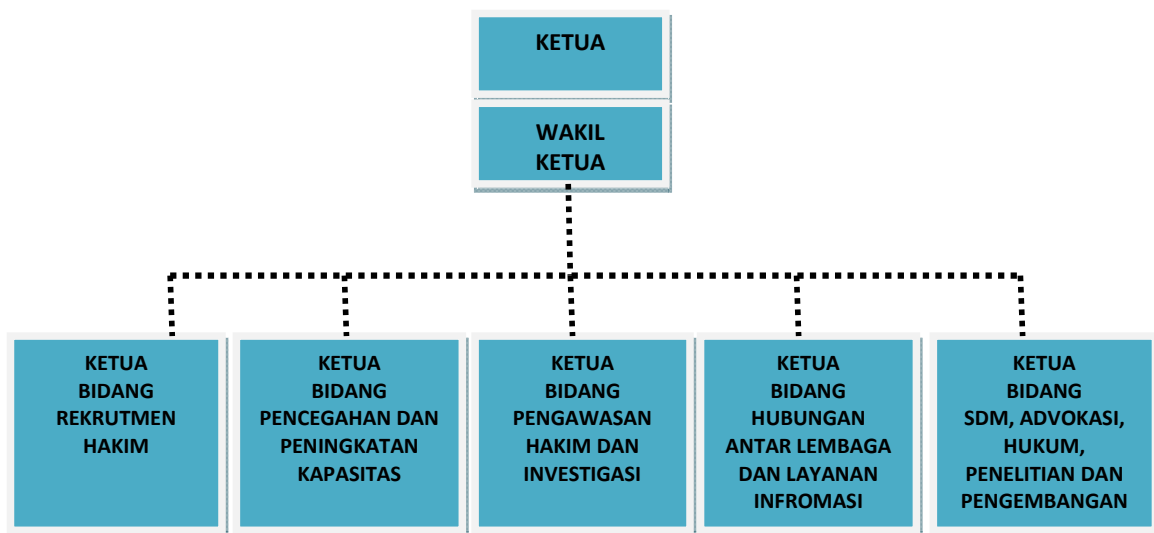
B. STRUKTUR ORGANISASI KOMISI YUDISIAL

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial membawahi bidang kerja masing-masing dengan dikordinasikan oleh seorang Ketua Bidang yang bertanggungjawab kepada Rapat Pleno Komisi Yudisial serta dibantu oleh kelompok Tenaga Ahli dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial dinyatakan bahwa bidang Komisi

Yudisial terdiri atas :

- a. Bidang Rekrutmen Hakim;
- b. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas;
- c. Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi;
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi; dan
- e. Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan.

Gambar 1
Struktur Organisasi Komisi Yudisial
(Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013)



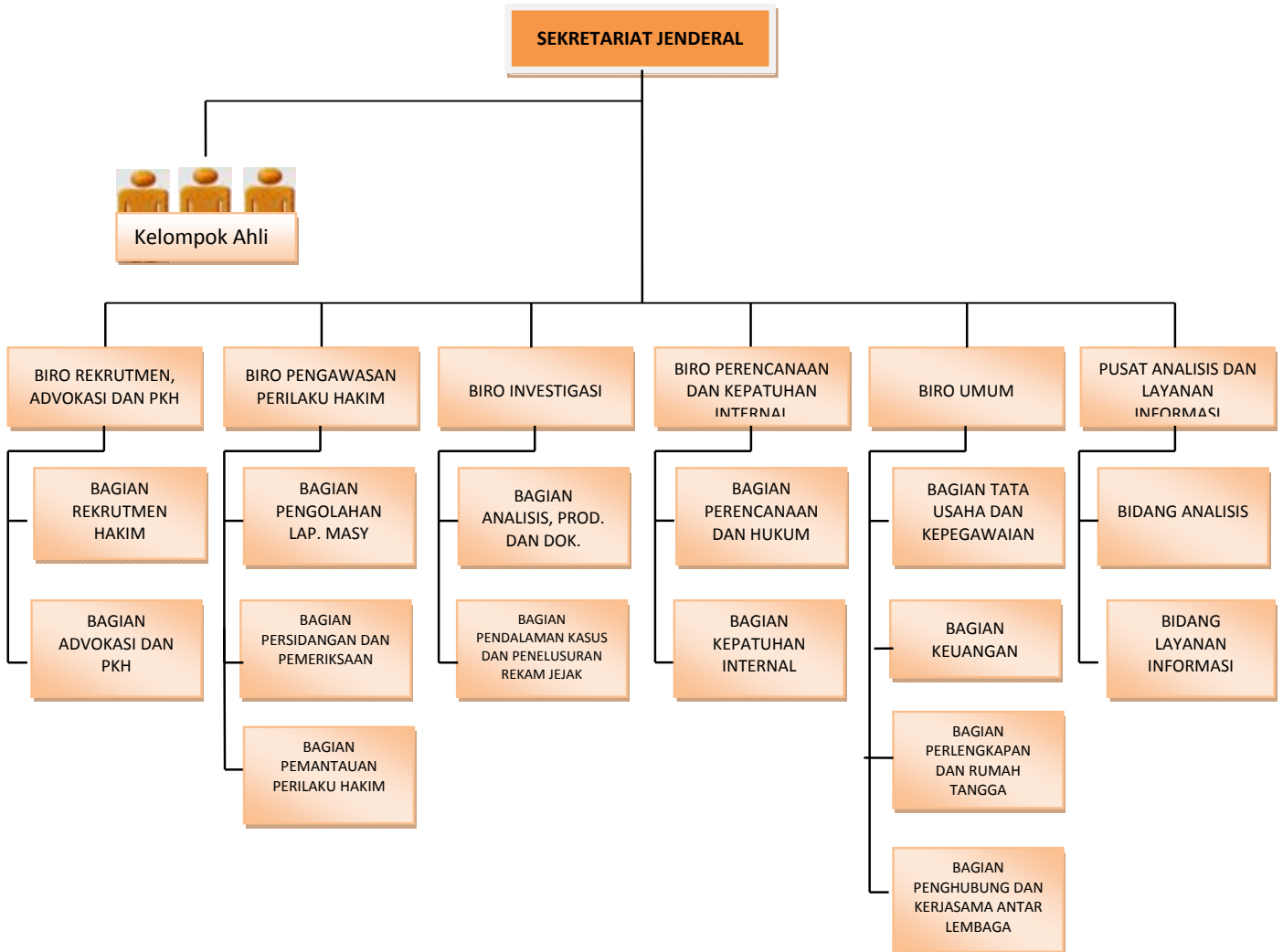
Dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial, dibentuk Sekretariat Jenderal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 dinyatakan bahwa:

- a. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) Biro dan 1 (satu) Pusat.
- b. Masing-masing Biro terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
- c. Pusat terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau masing-masing Bidang dapat terdiri atas 2 (dua) Subbidang.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 kemudian diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Gambar 2

**Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
(Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012)**





PERJANJIAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Komisi Yudisial tahun 2014 tidak dapat dilepaskan dari penyusunan Renstra Komisi Yudisial 2010-2014 (perubahan) yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penetapan Kinerja (PK) menjadi suatu janji kinerja bagi Komisi Yudisial beserta jajarannya untuk mewujudkan janji tersebut berupa besaran target yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 43/SET.KY/PR.05.01/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2014, Sekretaris Jenderal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai acuan setiap unit kerja untuk mengukur, menganalisis dan mengevaluasi peningkatan kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Komisi Yudisial. Penetapan Kinerja Komisi Yudisial tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1
Indikator dan Target Kinerja
Tahun 2014**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial	1 Persentase (%) dokumen dan laporan yang akurat dan diterbitkan tepat waktu	90%
		2 Persentase (%) pegawai yang dapat memenuhi target kinerja	95%
		3 Opini BPK	WTP
		4 Skor Opini Publik mengenai kinerja KY	Baik
		5 Persentase (%) kepatuhan/ketaatan pegawai terhadap kode etik pegawai	80%
		6 Persentase (%) kepuasan pegawai terhadap sistem dan metode kerja	60%
		7 Jumlah penyusunan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi di bidang yudisial	13 publikasi
		8 Jumlah rata-rata pengunjung website KYRI per hari	350 orang/hari

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
2	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana KY secara optimal	1 Skor survey kepuasan terhadap sarana dan prasarana yang tersedia	Memadai
3	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1 Persentase (%) kelulusan peserta pendidikan hakim yang direkomendasikan	100%
		2 Jumlah kegiatan penyusunan metode dan tata cara rekrutmen calon hakim agung dan calon hakim <i>ad hoc</i> di Mahkamah Agung	3 kegiatan
		3 Jumlah calon hakim agung dan calon hakim <i>ad hoc</i> di MA yang lulus seleksi	10 CHA
		4 Persentase peningkatan jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas hakim	100%
		5 Jumlah rekomendasi advokasi hakim	10 rekomendasi
		6 Persentase (%) peningkatan laporan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	30%
		7 Persentase (%) laporan hasil investigasi (LHI) yang dimanfaatkan dalam sidang panel-pleno	80%



AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial tahun 2014 ini disusun dengan cara mengukur capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2014. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target yang direncanakan untuk dicapai pada tahun yang bersangkutan. Indikator dan target kinerja tersebut terdiri dari indikator dan target kinerja sasaran dan kegiatan yang keduanya dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014. Kemudian pada akhir tahun dilakukan perbandingan antara rencana/target kinerja (*performance plan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*) organisasi. Perbedaan antara rencana/target kinerja dengan realisasi menggambarkan kesenjangan kinerja (*performance gap*). Selanjutnya atas kesenjangan kinerja yang ada diuraikan alasan tercapai atau tidak tercapainya target kinerja.

Proses penilaian atas pencapaian sasaran didasarkan atas pencapaian indikator kinerja output terhadap sasaran yang ditentukan. Nilai capaian kinerja tersebut diperoleh dengan membandingkan antara target dengan realisasi. Hasilnya merupakan skor yang menggambarkan tingkat keberhasilan, dengan kategori penilaian sebagai berikut:

85% < N ≤ 100% : Sangat Berhasil

70% - 85% : Berhasil

55% - 70% : Cukup Berhasil

N < 55% : Tidak Berhasil

*N = Nilai Capaian Kinerja

Secara umum Komisi Yudisial telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2014. Terhadap capaian kinerja tersebut kemudian dilakukan analisis sebagai berikut:

1) PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2014

Dari rincian formulir Pengukuran Kinerja tahun 2014 pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2014 secara umum telah sesuai dengan target outcome yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2014, dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar **82,08%** atau dengan predikat "**Berhasil**".

Tingkat capaian rata-rata tahun 2014 untuk masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2014

No.	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Dukungan Teknis Administratif kepada Komisi Yudisial	100,00
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana KY Secara Optimal	75,00
3.	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	71,24
Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja		82,08

Berdasarkan informasi data pada tabel di atas dapat diuraikan rincian dari masing-masing sasaran sebagai berikut:

a. Sasaran 1 : Meningkatkan Dukungan Teknis Administratif Kepada Komisi Yudisial

Untuk mencapai sasaran ini terdapat 8 indikator yang dilaksanakan. Rincian tingkat capaian target sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Tingkat Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran 1
Tahun 2014

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial	1 Persentase (%) dokumen dan laporan yang akurat dan diterbitkan tepat waktu	90%	94,29%	100,00
		2 Persentase (%) pegawai yang dapat memenuhi target kinerja	95%	99,19%	100,00
		3 Opini BPK	WTP	WTP	100,00
		4 Skor Opini Publik mengenai kinerja KY	Baik	Baik	100,00
		5 Persentase (%) kepatuhan/ketaatan pegawai terhadap kode etik pegawai	80%	99,03%	100,00
		6 Persentase (%) kepuasan pegawai terhadap sistem dan metode kerja	60%	61,11%	100,00
		7 Jumlah penyusunan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi di bidang yudisial	13 publikasi	13 Publikasi	100,00
		8 Jumlah rata-rata pengunjung website KYRI per hari	350 orang/hari	893 orang/hari	100,00
Capaian Kinerja Sasaran 1					100,00

Sasaran ini memperoleh predikat “**Sangat Berhasil**” dengan nilai capaian kinerja sasaran sebesar **100,00%**.

Uraian analisis tiap-tiap indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase (%) Dokumen dan Laporan Yang Akurat dan Diterbitkan Tepat Waktu

Dokumen dan Laporan yang dimaksud disini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya:

- a) Dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat
- b) Dokumen SDM yang tersusun tepat waktu
- c) Dokumen laporan keuangan dan akuntansi yang diproses secara tepat waktu dan akurat
- d) Laporan monitoring dan evaluasi yang disusun tepat waktu dan akurat

Capaian dari masing-masing dokumen/laporan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat

Tabel 4
Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Anggaran Yang Diproses Dengan Tepat Waktu Dan Akurat

No.	Jenis Dokumen	Ditujukan	Batas Waktu	Waktu Penyampaian
1	Dok. Hasil Kesepakatan Tiga Pihak (Trilateral Meeting)/ TM 1	Bappenas, Kemenkeu	8 April 2014	8 April 2014
2	Dok. Hasil Kesepakatan Tiga Pihak (Trilateral Meeting)/ TM II	Bappenas, Kemenkeu	27 Agustus 2014	27 Agustus 2014
3	Rencana Kerja Tahun 2015 (Renja 2015)	Bappenas	14 April 2014	14 April 2014
4	Bahan RDP dengan DPR RI	Sekretariat Komisi III DPR RI	9 Juni 2014	9 Juni 2014
5	Bahan RDP dengan DPR RI	Sekretariat Komisi III DPR RI	2 September 2014	2 September 2014
6	Bahan RDP dengan DPR RI	Sekretariat Komisi III DPR RI	24 September 2014	24 September 2014
7	Usulan Target PNBPN tahun 2015	Ditjen Anggaran	21 Januari 2014	21 Januari 2014
8	Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (PK dan RKT)	KemenPANRB	28 Februari 2014	28 Februari 2014
9	Draft Renstra KY 2015-2019	Bappenas	29 Desember 2014	29 Desember 2014

No.	Jenis Dokumen	Ditujukan	Batas Waktu	Waktu Penyampaian
10	Bahan Rapat Kerja KY Tahun 2014	-	6-8 Maret 2014	6-8 Maret 2014
11	RKA KL	Ditjen Anggaran	17 Juli 2014	17 Juli 2014
12	Rancangan Arsitektur dan Desain Informasi Kinerja dalam RKA KL (ADIK RKA K/L)	DSP Kemenkeu	31 Oktober 2014	31 Oktober 2014
13	Usulan SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (<i>Output</i>)	Ditjen Anggaran	2 Mei 2014	2 Mei 2014
14	Usulan SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (<i>Sub Output</i>)	Ditjen Anggaran	2 Mei 2014	2 Mei 2014
15	Revisi POK (tindak lanjut APBNP) tahun 2014	Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu	20 Juni 2014	20 Juni 2014

b) Dokumen SDM yang tersusun tepat waktu

Tabel 5
Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Tersusun Tepat Waktu

No.	Jenis Dokumen	Komponen Dokumen	Batas Waktu	Waktu Penyelesaian
1	Dokumen Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV	1. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan 2. Surat Pernyataan Pelantikan 3. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan 4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	1 hari sebelum pelaksanaan pelantikan	1 hari sebelum pelaksanaan pelantikan
2	Laporan Pengadaan CPNS Setjen KY 2013	Laporan Pengadaan CPNS Setjen KY 2013	Maksimal 1 bulan setelah selesai Seleksi CPNS	1 bulan setelah selesai Seleksi CPNS
3	Dokumen pengangkatan CPNS	1. SK Pengangkatan CPNS	Bertepatan dengan tanggal ditetapkan setelah mendapatkan NIP	Bertepatan dengan tanggal ditetapkan setelah mendapatkan NIP

No.	Jenis Dokumen	Komponen Dokumen	Batas Waktu	Waktu Penyelesaian
4	Dokumen Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II dan III	<ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Surat Pernyataan Pelantikan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas 	1 hari sebelum pelaksanaan pelantikan	1 hari sebelum pelaksanaan pelantikan
5	Dokumen Kenaikan Pangkat periode April 2014	<ol style="list-style-type: none"> Nota Usul Kenaikan Pangkat SK Kenaikan Pangkat 	<ol style="list-style-type: none"> Batas pengiriman Nota Usul 15 Maret 2014 Batas penetapan SK Kenaikan Pangkat 1 April 2014 	<ol style="list-style-type: none"> Pengiriman Nota Usul 13 Maret 2014 Penetapan SK Kenaikan Pangkat 30 Maret 2014
6	Dokumen Usul Formasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2014	<ol style="list-style-type: none"> Usul Formasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2014 Proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun ke depan 	Akhir Februari 2014	Februari 2014
7	Dokumen Peta Jabatan Komisi Yudisial	Peta Jabatan Komisi Yudisial	Akhir Februari 2014	Februari 2014
8	Dokumen Evaluasi Kehadiran Pegawai Setjen KYRI Periode I	Rekapitulasi kekurangan jam kerja	Juni 2014	Mei 2014
9	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Semester I	<ol style="list-style-type: none"> Daftar pegawai yang belum mengumpulkan SKP dan penilaian akumulasi 3 bulanan Catatan Evaluasi 	Mei 2014	Mei 2014

No.	Jenis Dokumen	Komponen Dokumen	Batas Waktu	Waktu Penyelesaian
10	Dokumen Evaluasi Kehadiran Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Periode II	Rekapitulasi kekurangan jam kerja	Agustus 2014	Agustus 2014
11	Jadwal Retensi Arsip	Jadwal Retensi Arsip	Desember 2014	Desember 2014
12	Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik	Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik	Desember 2014	Desember 2014
13	Laporan Penyusutan Arsip	Laporan Penyusutan Arsip	Desember 2014	Desember 2014
14	Pedoman Keprotokolan	Pedoman Keprotokolan	Desember 2014	Desember 2014

- c) Dokumen laporan keuangan dan akuntansi yang diproses secara tepat waktu dan akurat

Tabel 6
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Dan Akuntansi Yang Diproses Secara Tepat Waktu Dan Akurat

No.	Jenis Dokumen yg di Proses	Ditujukan	Batas Waktu	Waktu Penyampaian
1	Laporan Keuangan Lembaga Tahunan (T.A. 2012)	<ul style="list-style-type: none"> Dit. APK BPK 	Bulan Februari	Bulan Februari
2	Laporan Keuangan Semesteran (Semester I T.A. 2013)	<ul style="list-style-type: none"> Dit. APK BPK 	Bulan Juli	Bulan Juli
3	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	Sekjen KYRI	Awal Bulan	Tanggal 1
4	Laporan Pemeriksaan Kas dan Data Khusus Bendahara	Sekjen KYRI	Awal Bulan	Tanggal 1
5	Rekonsiliasi Direktorat APK Dirjen Perbendaharaan	Dit. APK	Januari	Januari
6	Laporan Realisasi Anggaran Belanja	KPPN Jakarta IV	Tgl 12/ Bulan	Minggu 1
7	Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja	KPPN Jakarta IV	Tgl 12/ Bulan	Minggu 1

8	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan	KPPN Jakarta IV	Tgl 12/ Bulan	Minggu 1
9	Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan	KPPN Jakarta IV	Tgl 12/ Bulan	Minggu 1
10	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Non Pajak	KPPN Jakarta IV	Tgl 12/ Bulan	Minggu 1
11	Laporan Estimasi Pendapatan	KPPN Jakarta IV	Tgl 12/ Bulan	Minggu 1
12	Laporan Mutasi Uang Persediaan	KPPN Jakarta IV	Tgl 12/ Bulan	Minggu 1
13	Rekonsiliasi Data Hibah	Dit. EAS DJPU	Triwulan	12 Januari
14	Laporan Realisasi Penerimaan Hibah	Dit. EAS DJPU	Triwulan	12 Januari
15	Laporan SPT Masa PPN	KPP	Minggu ke-2	Minggu ke-2
16	Laporan SPT Masa PPh 21	KPP	Minggu ke-2	Minggu ke-2
17	Laporan SPT Masa PPh 22	KPP	Minggu ke-2	Minggu ke-2
18	Laporan SPT Masa PPh 23	KPP	Minggu ke-2	Minggu ke-2
19	Laporan Barang Pengguna Tahunan	Dit. BMN DJKN	21 Januari	17 Januari
20	Laporan Kondisi Barang Tahunan	Dit. BMN DJKN	21 Januari	17 Januari
21	Laporan Barang Persediaan Tahunan	Dit. BMN DJKN	21 Januari	17 Januari
22	Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahunan	Dit. BMN DJKN	21 Januari	17 Januari
23	Laporan Barang Pengguna Semesteran	Dit. BMN DJKN	21 Juli	19 Juli
24	Laporan Kondisi Barang Semesteran	Dit. BMN DJKN	21 Juli	19 Juli
25	Laporan Barang Persediaan Semesteran	Dit. BMN DJKN	21 Juli	19 Juli
26	Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Semesteran	Dit. BMN DJKN	21 Juli	19 Juli

- d) Laporan monitoring dan evaluasi yang disusun tepat waktu dan akurat

Tabel 7
Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi
Yang Disusun Tepat Waktu Dan Akurat

No.	Jenis laporan	Ditujukan	Batas Waktu	Waktu Penyampaian
1	Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2013	Presiden	Januari 2014	Januari 2014
2	Laporan Evaluasi kegiatan dan penyerapan anggaran Komisi Yudisial tahun 2013	TEPPA	Januari 2014	Januari 2014
3	LAKIP KYRI Tahun 2013	MenPANRB	15 Maret 2014	14 Maret 2014
4	Laporan Hibah Triwulan IV TA 2013	- Menteri PPN/Kepala Bappenas - Menteri Keuangan	23 Januari 2014	22 Januari 2014
5	Laporan Hibah Triwulan I TA 2014	- Menteri PPN/Kepala Bappenas - Menteri Keuangan	23 April 2014	22 April 2014
6	Laporan Inventarisasi Hibah Luar Negeri tahun 2010-2014	Bappenas	27 Juni 2014	26 Juni 2014
7	Bahan lampiran Pidato Presiden	Menteri PPN/Kepala Bappenas	30 Mei 2014	30 Mei 2014
8	Laporan e-Monev Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2013 triwulan IV	Bappenas	15 Januari 2014	10 Januari 2014
9	Laporan e-Monev Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2014 triwulan I	Bappenas	18 April 2014	15 April 2014
10	Laporan e-Monev Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2014 triwulan II	Bappenas	15 Juli 2014	15 Juli 2014

No.	Jenis laporan	Ditujukan	Batas Waktu	Waktu Penyampaian
11	Laporan e-Monev Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2014 triwulan III	Bappenas	17 Oktober 2014	17 Oktober 2014
12	Laporan e-Monev Penganggaran bulan Desember tahun 2013	DJA	15 Januari	15 Januari
13	Laporan Aksi PPK tahun 2013 (B12)	Bappenas	5 Januari	3 Januari
14	Laporan Aksi PPK tahun 2013 (B04)	Bappenas	5 April	4 April
15	Laporan Aksi PPK tahun 2014 (B06)	Bappenas	5 Juli	4 Juli
16	Laporan Aksi PPK tahun 2014 (B09)	Bappenas	5 Oktober	3 Oktober
17	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara	- Sekjen KYRI - Kepala Biro/Pusat - Penghubung KY	Desember 2014	2 Desember 2014
18	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah	- Sekjen KYRI - Kepala Biro/Pusat - Penghubung KY	Desember 2014	2 Desember 2014
19	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur	- Sekjen KYRI - Kepala Biro/Pusat - Penghubung KY	Desember 2014	2 Desember 2014
20	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat	- Sekjen KYRI - Kepala Biro/Pusat - Penghubung KY	Desember 2014	2 Desember 2014

No.	Jenis laporan	Ditujukan	Batas Waktu	Waktu Penyampaian
21	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur	- Sekjen KYRI - Kepala Biro/Pusat - Penghubung KY	Desember 2014	2 Desember 2014
22	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan	- Sekjen KYRI - Kepala Biro/Pusat - Penghubung KY	Desember 2014	2 Desember 2014

Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa jumlah target dokumen dan laporan yang akurat dan diterbitkan tepat waktu sebanyak 70 dokumen/laporan dengan realisasi capaian sebanyak 66 dokumen/laporan atau sebesar 94,29%. Realisasi capaian sebesar 94,29% melebihi target indikator kinerja sebesar 90%, sehingga nilai capaian kinerjanya sebesar 100%.

2. **Persentase (%) Pegawai Yang Dapat Memenuhi Target Kinerja**

Kriteria Pegawai yang dapat memenuhi target kinerja diukur berdasarkan hasil Penilaian Prestasi kerja Pegawai yang tertuang dalam Penilaian SKP dengan predikat minimal baik. Dari 206 Pegawai Negeri Sipil Komisi Yudisial, baru 124 pegawai yang mengumpulkan Penilaian SKP. Sedangkan sisanya sebanyak 81 pegawai belum melakukan penilaian terhadap prestasi kinerjanya. Hal tersebut dikarenakan belum seluruh pegawai memahami tata cara pengisian dan penilaian kinerja. Sampai dengan Laporan Kinerja ini diterbitkan, 81 pegawai masih melakukan penyesuaian dan pengisian terhadap kinerjanya.

Dari 124 pegawai yang telah mengumpulkan SKP, hampir seluruhnya memperoleh hasil penilaian dengan predikat "Baik" dan "Sangat Baik". Hanya 1 pegawai yang memperoleh nilai "Cukup". Dengan demikian, dari 124 pegawai yang diukur kinerjanya, maka sebanyak 123 pegawai atau 99,19% telah memenuhi target kinerja. Indikator Persentase (%) Pegawai

Yang Dapat Memenuhi Target Kinerja memperoleh nilai capaian sebesar 100% karena melebihi target tercapai 95%.

Tabel 8
Penilaian Hasil Kinerja Pegawai

No.	Biro/Pusat	Cukup	Baik	Sangat Baik	Jumlah
1.	Biro Rekrutmen, Advokasi dan peningkatan Kapasitas Hakim	0	18	0	18
2.	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	0	5	18	23
3.	Biro Investigasi	0	4	23	27
4.	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	0	3	0	3
5.	Biro Umum	1	24	8	33
6.	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	0	19	1	20
Jumlah		1	73	50	124

3. Opini BPK

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara, Komisi Yudisial wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa Laporan Keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib di periksa oleh BPK RI sebelum diserahkan kepada DPR. Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan menghasilkan opini yang saat ini dijadikan salah satu indikator kinerja akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Komisi Yudisial telah melakukan pengelolaan dan pertanggungjawabkan dengan transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat terlihat dari penghargaan yang kembali diperoleh yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial tahun 2013 dari hasil pemeriksaan BPK RI. Sehingga terhadap indikator kinerja Opini BPK, Komisi Yudisial memperoleh capaian sebesar 100%. Opini WTP dari BPK tersebut

merupakan yang ketujuh kalinya diraih Komisi Yudisial secara berturut-turut, sejak tahun 2008.

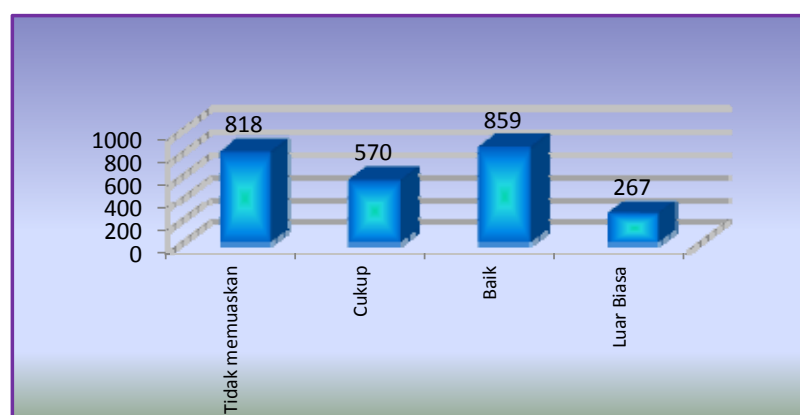
Tabel 9
Opini Laporan Keuangan Komisi Yudisial

No.	Tahun Anggaran Laporan Keuangan	Opini
1.	2006	WDP
2.	2007	WTP
3.	2008	WTP
4.	2009	WTP
5.	2010	WTP
6.	2011	WTP
7.	2012	WTP
8.	2013	WTP

4. Skor Opini Publik Mengenai Kinerja KY

Indikator “Skor Publik Mengenai Kinerja KY” baru muncul pada tahun 2014. Hasil skor indikator ini diperoleh berdasarkan polling melalui website Komisi Yudisial (www.komisiyudisial.go.id). Dari 2514 responden yang mengikuti polling, sebanyak 818 orang (32,5%) menjawab kinerja Komisi Yudisial sekarang ini “tidak memuaskan”, 570 orang (22,7%) menjawab “cukup”, 859 orang (34,2%) menjawab “baik” dan 267 orang (10,6%) menjawab “luar biasa”. Oleh karena sebagian besar responden menjawab “baik”, maka untuk indikator skor opini publik mengenai kinerja KY, Komisi Yudisial berhasil mencapai 100%.

Grafik 1
Hasil Polling “Bagaimana Kinerja Komisi Yudisial Sekarang Ini?”



5. Persentase (%) Kepatuhan /Ketaatan Pegawai Terhadap Kode Etik Pegawai

Indikator kinerja ini muncul pada tahun 2014 disebabkan implementasi perubahan Rencana Strategis Komisi Yudisial pada tahun 2013. Pada Tahun 2014 dari 206 pegawai hanya 2 (dua) orang pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan mendapatkan sanksi disiplin berupa Pemberhentian Sementara dan Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama satu tahun, sehingga tingkat kepatuhan/ketaatan terhadap kode etik mencapai 99,03%. Angka realisasi tersebut melebihi target yang telah ditentukan yaitu 80%. Sehingga indikator ini memperoleh nilai capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan meningkatnya disiplin dan integritas pegawai serta peran aktif atasan langsung dalam melakukan pengawasan dalam rangka penegakan kode etik pegawai di Lingkungan Komisi Yudisial.

6. Persentase (%) Kepuasan Pegawai Terhadap Sistem dan Metode Kerja

Dari hasil survey terhadap 206 PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, diperoleh 108 responden yang memberikan pendapat atau tanggapan terkait kepuasan terhadap sistem dan metode kerja. Dari jumlah responden yang menjawab survey, sebanyak 66 responden atau 61,11% menjawab setuju. Jika dilihat dari target yang ditetapkan jumlah tersebut melampaui target pada awal tahun sebesar 60%. Sehingga dapat dikatakan nilai capaian indikator ini mencapai 100%. Pencapaian tersebut disebabkan oleh telah terselenggaranya program pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan serta adanya sistem baru untuk melakukan penilaian capaian kerja pegawai.

7. Jumlah Penyusunan Buku dan Berbagai Bentuk Publikasi Informasi di Bidang Yudisial

Komisi Yudisial senantiasa berusaha memberikan publikasi informasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui perkembangan hukum dan juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk lebih mengenal tentang

keberadaan Komisi Yudisial. Salah satu bentuk publikasi yang digunakan oleh Komisi Yudisial adalah media cetak berupa sejumlah buku sebagai bentuk publikasi informasi khususnya informasi di bidang yudisial.

Indikator sasaran jumlah penyusunan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi di bidang yudisial dari target sebanyak 13 publikasi dapat direalisasikan sebanyak 13 publikasi. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 100%. Adapun jenis publikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Jumlah Penyusunan Buku dan Berbagai Bentuk Publikasi Informasi
Di Bidang Yudisial
Tahun 2014

No.	Jenis Buku	Muatan Informasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Majalah Komisi Yudisial	Isu Aktual Komisi Yudisial, Masalah Hukum dan Peradilan	6 publikasi	6 publikasi	100,00
2.	Jurnal Komisi Yudisial	Hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan yang dilakukan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak yang berkompeten	3 publikasi	3 publikasi	100,00
3.	Buku Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial	Kiprah Komisi Yudisial dari tahun pertama sampai tahun 2014	1 publikasi	1 publikasi	100,00
4.	Buku Bunga Rampai	kumpulan tulisan atau pemikiran-pemikiran dari para pakar dan praktisi hukum berdasarkan tema yang telah disepakati mengenai perkembangan hukum dan peradilan yang terjadi di Indonesia	1 publikasi	1 publikasi	100,00
5.	Buku Profil Kelembagaan	Buku tentang profil kelembagaan dalam bentuk tulisan	1 publikasi	1 publikasi	100,00
6.	Buku Agenda Komisi Yudisial	Profil KY dan notes yang digunakan untuk catatan harian pegawai	1 publikasi	1 publikasi	100,00
Jumlah			13 Publikasi	13 Publikasi	100,00

8. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Website KYRI Per Hari

Keberadaan website Komisi Yudisial memberi nilai manfaat bagi masyarakat luas, karena melalui website, masyarakat dapat berinteraksi langsung secara online dengan Komisi Yudisial untuk menyampaikan pengaduan mengenai penyimpangan perilaku hakim dan mengetahui perkembangan penanganannya, mengetahui informasi seputar kinerja Komisi Yudisial serta memperoleh informasi mengenai media pustaka terbitan Komisi Yudisial. Masyarakat juga dapat mengetahui kiprah Komisi Yudisial di tahun-tahun sebelumnya dan juga dapat mengakses berita seputar dunia hukum dan peradilan.

Pada tahun 2014 alamat website Komisi Yudisial yaitu www.komisiyudisial.go.id telah memonitor dan merekam jumlah kunjungan yang dilakukan terhadap website Komisi Yudisial. Dari data yang diperoleh, website resmi Komisi Yudisial ini tercatat memiliki trafik sebanyak rata-rata 893 orang pengunjung per hari. Sehingga indikator sasaran jumlah rata-rata pengunjung website KYRI per hari memiliki nilai capaian sebesar 100%. Dimana dari target rata-rata 100 orang pengunjung per hari dapat direalisasikan sebanyak rata-rata 893 orang pengunjung per hari.

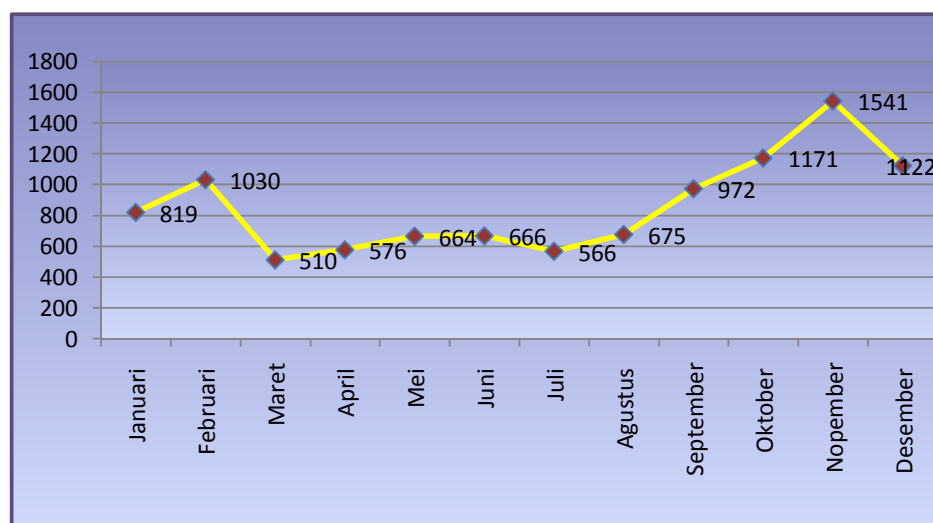
Tingginya angka kunjungan pada website Komisi Yudisial dikarenakan konten atau isi dari website Komisi Yudisial menyuguhkan informasi yang dibutuhkan, baik oleh masyarakat umum maupun insan media. Bahkan pada bulan September hingga Desember terdapat kenaikan jumlah pengunjung secara signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pengumuman mengenai penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Adapun jumlah pengunjung website Komisi Yudisial selama tahun 2014 adalah sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 11
Jumlah Pengunjung Website Komisi Yudisial
Tahun 2014

No.	Bulan	Jumlah Pengunjung	Rata-rata pengunjung per hari
1	Januari	25402	819
2	Februari	28831	1030
3	Maret	15815	510
4	April	29483	983
5	Mei	20583	664
6	Juni	19967	666
7	Juli	17554	566
8	Agustus	20921	675
9	September	29148	972
10	Oktober	36306	1171
11	Nopember	46226	1541
12	Desember	34770	1122
Jumlah		325006	10718
Rata-rata pengunjung website perhari		893	

Grafik 2
Jumlah Kunjungan Website Komisi Yudisial
(Per Bulan) Tahun 2014



Bila dibandingkan pada tahun tahun sebelumnya, jumlah rata-rata pengunjung *website* Komisi Yudisial per hari cenderung mengalami peningkatan.

Tabel 12
Jumlah Rata-rata Pengunjung *Website* KYRI per hari
Tahun 2011 – 2014

No.	Tahun	Rata-rata pengunjung per hari
1	2011	846
2	2012	225
3	2013	820
4	2014	859

b. Sasaran 2 : Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana KY Secara Optimal

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Yudisial perlu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mencapai hal tersebut Komisi Yudisial membuat indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 13
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 2
Tahun 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana KY Secara Optimal	1 Skor Survey Kepuasan Terhadap Sarana dan Prasarana Yang tersedia	Memadai	Cukup Memadai	75%
Capaian Kinerja Sasaran 2				75%

Sasaran strategis ini memperoleh predikat “**Berhasil**” dengan nilai capaian kinerja sasaran sebesar 75%.

Uraian analisis indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Survey terhadap Kepuasan Terhadap Sarana dan Prasarana yang Tersedia dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan *sampling* sebanyak 57 responden. Secara umum, mayoritas responden yang menyatakan cukup

memadai sebanyak 61,53%, sedangkan responden yang menyatakan memadai 23,06%, tidak memadai 12,03%, sangat memadai 2,63% dan sangat tidak memadai 0,75%.

Tabel 14
Hasil Survey terhadap Kepuasan Terhadap Sarana dan Prasarana yang Tersedia

No.	Kriteria	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1.	Sangat Memadai	2	2,63
2.	Memadai	13	23,06
3.	Cukup Memadai	35	61,53
4.	Tidak Memadai	7	12,03
5.	Sangat Tidak Memadai	0	0,75
Jumlah		57	100,00

Kuesioner ini menggunakan 5 variable jawaban, dengan bobot sebagai berikut:

- a. Sangat memadai = 100%
- b. Memadai = 80%
- c. Cukup memadai = 60%
- d. Tidak memadai = 40%
- e. Sangat tidak memadai = 20%

Oleh karena target “memadai” mempunyai bobot sebesar 80%, sedangkan rata-rata hasil surveynya “cukup memadai” dengan bobot 60%, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap indikator “skor survey kepuasan terhadap sarana dan prasarana yang tersedia” diperoleh nilai capaian sebesar 75%.

c. Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Hakim, Hakim Agung Dan Hakim Adhoc Di Makamah Agung Melalui Proses Seleksi, Peningkatan Kapasitas Dan Advokasi, Serta Penanganan Laporan Masyarakat Terkait Pelanggaran KEPPH

Terkait tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam mengusulkan calon hakim agung ke DPR dan pengawasan perilaku hakim, Komisi membuat sasaran strategis ini dengan beberapa indikator, yaitu:

Tabel 15
Tingkat Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran 3
Tahun 2014

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1	Persentase (%) kelulusan peserta pendidikan hakim yang direkomendasikan	100%	97,56 %	97,56
		2	Jumlah kegiatan penyusunan metode dan tata cara rekrutmen calon hakim agung dan calon hakim <i>ad hoc</i> di Mahkamah Agung	3 kegiatan	3 kegiatan	100,00
		3	Jumlah calon hakim agung dan calon hakim <i>ad hoc</i> di MA yang lulus seleksi	10 CHA	5 CHA	50,00
		4	Persentase peningkatan jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas hakim	100%	- 41,32%	0,00
		5	Jumlah rekomendasi advokasi hakim	10 rekomendasi	10	100,00
		6	Persentase (%) peningkatan laporan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	30%	22,50%	75%
		7	Persentase (%) laporan hasil investigasi (LHI) yang dimanfaatkan dalam sidang panel-pleno	80%	60,87	76,09
		Capaian Kinerja Sasaran 3				

Sasaran ini memperoleh predikat “**Berhasil**” dengan nilai capaian kinerja sasaran sebesar **71,24%**.

Uraian analisis tiap-tiap indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase (%) Kelulusan Peserta Pendidikan Hakim Yang Direkomendasikan

Sejak tahun 2009 melalui tiga Undang-Undang Peradilan, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Komisi Yudisial diberi kewenangan baru untuk melaksanakan Seleksi Pengangkatan Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Berdasarkan tiga Undang-Undang tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Bersama tahun 2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim. Pasal 4 Perba No.01/PB/MA/IX/2012-01/PB/P.KOMISI YUDISIAL/09/2012 Tahun 2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim, mengamanatkan Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan kepada Cakim Angkatan VII tahun 2010 sebanyak 205 (dua ratus lima) orang.

Selanjutnya pada 8 April 2014, Panitia Seleksi Calon Hakim dan Komisi Yudisial telah melaksanakan rapat kelulusan Calon Hakim, dimana Komisi Yudisial merekomendasikan 200 orang dinyatakan lulus. Rekomendasi Komisi Yudisial tersebut disampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai dasar untuk pengangkatan hakim. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase (%) kelulusan peserta pendidikan hakim yang direkomendasikan berhasil mencapai 97,56%. Indikator ini tidak mencapai target 100% dikarenakan terdapat 5 orang Calon Hakim yang tidak memenuhi criteria/persyaratan yang telah ditetapkan oleh Komisi Yudisial. Sehingga cakim tersebut tidak direkomendasikan untuk diangkat sebagai hakim. Ke depan, Komisi Yudisial akan melakukan penjangkaran terhadap SDM yang berpotensi sebagai hakim melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

2. Jumlah Kegiatan Penyusunan Metode dan Tata Cara Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Adhoc di Mahkamah Agung

Terhadap indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2014 ini, Komisi Yudisial berhasil mencapai target 100% dengan melakukan 3 kegiatan penyusunan metode dan tata cara rekrutmen calon hakim agung dan calon hakim adhoc di Mahkamah Agung.

Kegiatan ini terdiri dari :

- a) Kegiatan Penyusunan Peraturan Seleksi Hakim Agung
Kegiatan Penyempurnaan metode dan tata cara rekrutmen calon hakim agung dilakukan agar pelaksanaan seleksi calon hakim agung berjalan dengan efektif, efisien serta menghasilkan calon hakim agung yang berintegritas dan kompeten. Pada tanggal 24 April 2014 telah ditetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Seleksi Calon Hakim Agung.
- b) Penyusunan Draft Peraturan Seleksi hakim Ad Hoc di MA
Kegiatan penyusunan draft Peraturan Seleksi Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung telah dilakukan di tahun 2014, namun belum dibahas dalam rapat pleno Komisi Yudisial sehingga belum ditetapkan sebagai Peraturan Komisi Yudisial.
- c) Penyusunan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan Penyusunan Draft Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Peserta Pendidikan Hakim
Komisi Yudisial Bersama Mahkamah Agung telah menyusun draft Peraturan Bersama tentang Seleksi Hakim dan draft Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Peserta Pendidikan Hakim. Hasil pembahasan draft peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Seleksi Hakim telah disepakati bersama antara Tim dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada tanggal 16 September 2014. Peraturan yang telah disepakati tersebut kemudian diharmonisasi oleh bagian hukum Mahkamah Agung, namun sampai dengan disusunnya laporan ini Perba tersebut belum memasuki tahap penandatanganan oleh Pimpinan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

3. Jumlah Calon Hakim Agung Dan Calon Hakim Adhoc Di MA Yang Lulus Seleksi

Dalam rangka menindaklanjuti surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 02/WKMA/I/2014 tertanggal 30 Januari 2014 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim agung dan untuk memenuhi jumlah kebutuhan hakim agung, Komisi Yudisial telah melakukan seleksi calon hakim agung untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung sebanyak 10 orang, yaitu: kamar agama 2 orang, kamar perdata 3 orang, kamar pidana 2 orang, dan kamar Tata Usaha Negara 3 orang. Komisi Yudisial juga telah melakukan korespondensi dengan Mahkamah Agung perihal permintaan pengisian jabatan hakim adhoc di MA, berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan hakim adhoc di Mahkamah Agung, akan tetapi Mahkamah Agung belum membutuhkan hakim ad hoc di tahun 2014, sehingga Komisi Yudisial tidak menyelenggarakan seleksi calon hakim ad hoc.

Proses seleksi calon hakim dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Seleksi Calon Hakim melalui tahapan: penerimaan pendaftaran calon hakim agung, seleksi administrasi, seleksi uji kelayakan, penetapan kelulusan, dan penyampaian usulan kepada DPR.

Sejak dimulainya penerimaan pendaftaran calon hakim agung pada tanggal 17 Februari 2014 - 7 Maret 2014 dan diperpanjang menjadi 21 Maret 2014, jumlah pendaftar calon hakim agung tercatat sebanyak 72 calon, yang terdiri dari 50 karier dan 22 nonkarier. Setelah dilakukan serangkaian proses seleksi calon hakim agung, kemudian ditetapkanlah kelulusan CHA secara musyawarah mufakat melalui rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial pada tanggal 17 Juli 2014. Penentuan kelulusan dengan menggabungkan antara nilai seleksi kualitas dengan nilai wawancara dari setiap calon hakim agung yang kemudian dari nilai tersebut ditentukan batas kelulusannya.

Berdasarkan batas kelulusan atau *passing grade* tersebut Komisi Yudisial hanya mendapatkan 5 (lima) CHA yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung. Adapun calon hakim agung tahun 2014 yang diusulkan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

1. Is Sudaryono, S.H., M.H.
2. Amran Suadi, Dr., H., S.H., M.H., M.M.
3. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
4. Purwosusilo, Dr., H., S.H., M.H.
5. Muslich Bambang Luqmono S.H., M.Hum.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terhadap indikator jumlah calon hakim agung dan calon hakim adhoc di MA yang lulus seleksi, hanya terealisasi 5 CHA atau tercapai 50% dari target 10 CHA.

Meskipun indikator jumlah calon hakim agung dan calon hakim adhoc di MA yang lulus seleksi merupakan indikator baru yang muncul di tahun 2014, namun sejak tahun 2006 hingga tahun 2014 Komisi Yudisial telah meluluskan sebanyak 43 orang calon hakim agung yang kemudian diusulkan ke DPR.

Tabel 16
Jumlah Hakim Agung Yang Lulus Seleksi Tahun 2006 - 2014

Tahun	Latar Belakang		Jumlah
	Karier	Non Karier	
2006	1	2	3
2007	3	0	3
2008	4	3	7
2009	3	2	5
2010	1	1	2
2011	2	4	6
2012	8	0	8
2013	4	0	4
2014	5	0	5
Jumlah	31	12	43

4. **Persentase Peningkatan Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim**

Upaya peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dilakukan dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional, yang diarahkan untuk melengkapi dan mendukung peningkatan kapasitas hukum yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Agar pelaksanaan peningkatan kapasitas hakim dapat berjalan secara terencana, terarah, terprogram, dan terealisasi, telah disusun dan ditetapkan Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim, dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim.

Upaya peningkatan kapasitas hakim dilakukan dalam berbagai kegiatan dengan jumlah peserta sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel 17
Jumlah Peserta Pelatihan Kapasitas Hakim Tahun 2013 - 2014

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta (hakim)	
		2013	2014
1.	Pelatihan Tematik		
	a. Pelatihan Tematik “Ekonomi Syariah” Bagi Hakim Pengadilan Agama – Bandung	51	-
	b. Pelatihan Tematik Bagi Hakim Pengadilan Militer – Surabaya	27	-
	c. Pelatihan Tematik “Sengketa Tata Usaha Negara” Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara – Bogor	30	-
	d. Pelatihan Tematik “Hukum Acara Perdata” Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Umum – Bogor	28	-
	e. Pelatihan Tematik “Hukum Acara Perdata” Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Umum – Solo	31	-
	f. Pelatihan tematik Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang bagi Hakim dan Jaksa - Kuta Bali	-	35
2.	Pelatihan KEPPH “Pemantapan Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim dengan Masa Kerja 0 s.d. 8 tahun” – Bogor	-	33
3.	Pelatihan Hakim Jarak jauh (e-learning) “Ekonomi Syariah” melalui Situs Peningkatan Kapasitas Hakim	-	30
Jumlah		167	98

Dari data diatas tampak bahwa Komisi Yudisial tidak berhasil mencapai target yang diharapkan. Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas hakim yang diharapkan naik naik 100% dari tahun 2013 menjadi 334 hakim, malah turun 41,32% menjadi hanya 98 hakim. Sehingga terhadap indikator Persentase Peningkatan Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim nilai capaian yang diperoleh adalah 0%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2014 terdapat pemotongan anggaran belanja yang berdampak pada berkurangnya pendanaan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas hakim.

5. Jumlah Rekomendasi Advokasi Hakim

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi hakim, yang dimaksud dengan Advokasi hakim adalah rangkaian kegiatan untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Terhadap indikator jumlah rekomendasi advokasi hakim, Komisi Yudisial berhasil mencapai 100% dari target 10 rekomendasi advokasi hakim.

Rekomendasi tersebut antara lain:

- a) Penanganan laporan Sdri. Ir. Aifi Indrastuti, S.H. (Pengacara) tentang Penghinaan terhadap hakim dalam pemberitaan Koran Suara Merdeka tanggal 31 Oktober 2013, yang dilakukan oleh John Richard Latuihamallo, S.H. (Pengacara).
- b) Penanganan laporan Prof. Dr. Topane Gayuus Lumbuun, S.H., M.H., (Hakim Agung) tentang Fitnah/ Tuduhan dan Pemalsuan Dokumen yang disebarkan oleh media dan merugikan Pelapor dan Institusi Mahkamah Agung, yang dilakukan oleh Dedi Corbuzier cq. Manajemen Hitam Putih cq. Manajemen Trans7.
- c) Penanganan Informasi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim terhadap Ketua Pengadilan Negeri Depok Prim Haryadi, SH yang dilaporkan ke aparat kepolisian karena memerintahkan eksekusi dibawah tekanan massa atas sengketa lahan di Depok

d) Rekomendasi survey Judicial Education di Bandung

Survei yang dilaksanakan pada bulan Februari 2014 di Kota Bandung mempunyai beberapa rekomendasi yakni:

- Pentingnya mendorong langkah-langkah strategis pencegahan terhadap perbuatan yang diduga merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, misalnya melalui pendidikan atau penyadaran hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
- Mendukung MA untuk melakukan upaya peningkatan sistem manajemen keamanan baik di dalam maupun di luar persidangan (SDM, anggaran, sarana dan prasarana dll) secara sistemik dan berkelanjutan, misalnya melalui penegakan tata tertib persidangan secara tegas oleh hakim dan aparat pengadilan lainnya.
- Perlunya membangun komunikasi dan kerjasama yang intensif terkait SDM dan anggaran keamanan persidangan antara Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan, misalnya melalui pembentukan wadah komunikasi yang *multistakeholders* (dengan melibatkan antara Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Yudisial, masyarakat sipil, media massa, dll) untuk mewujudkan Pengadilan bebas kekerasan.
- Perlunya mendorong keterlibatan Komisi Yudisial dalam penguatan sistem advokasi hakim secara berkelanjutan.

e) Rekomendasi hasil diskusi terbatas (diseminasi hasil survey) di Bandung

Terhadap hasil survey di Bandung, kemudian dilakukan diseminasi hasil dengan mengundang sejumlah stake holder dalam forum diskusi terbatas yang menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu;

- Pembentukan forum judicial education di Bandung
- Penyusunan disain pembentukan pengamanan khusus pengadilan
- Pengusulan adanya penganggaran khusus polisi khusus pengadilan
- Pengusulan kesejahteraan hakim sebagai pejabat Negara.

- f) Penanganan laporan Kasianus Telaumbanua, S.H., (Wakil Ketua PN Lubuk Linggau) tentang adanya perbuatan mengganggu proses persidangan dan menghina hakim yang dilakukan oleh Aktamal Ramadhan (anggota Polres Musi Rawas).
- g) Penanganan informasi atas dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam persidangan Perkara nomor: 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST dengan terdakwa Sdr. Annas Urbaningrum, yang dilakukan oleh para pendukung terdakwa dalam bentuk meneriaki majelis hakim setelah menutup persidangan karena tidak memenuhi permintaan terdakwa untuk melakukan sumpah mubahalah (sumpah kutukan).
- h) Penanganan informasi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam Perkara Nomor 372/PID.B/2014/PN.Smn. dengan terdakwa Sdr. Abd. Kholiq yang didakwa telah menyerang Felicianus Tualaka. Kasus tersebut LBH Yogyakarta menilai tuntutan jaksa 4 (empat) bulan kurang masa tahanan sangat ringan, dan akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum.
- i) Penanganan informasi atas perbuatan pemukulan Kayat, S.H., (Wakil Ketua PN Barru) yang dilakukan oleh Sdr. Andi Khaeruddin selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barru.
- j) Penanganan Laporan Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., dkk, atas adanya komentar terhadap putusan pidana mati yang dinilai tidak tepat oleh Djoko Sarwoko (Mantan Hakim Agung/ Juru Bicara MA), serta meminta pendapat KY terkait tafsiran dalam KEPPH Butir 3.2. (4) perkara “tertentu”.

6. Persentase (%) Peningkatan Laporan Masyarakat Yang Ditangani Hingga Tuntas

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014 jumlah laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial mengalami kenaikan dan penurunan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 18
Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat Tahun 2010-2014

No.	Jenis Surat/Laporan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Laporan Masyarakat	1.452	1.717	1.470	2.193	1.781
2	Surat Tembusan	1.642	1.622	1.779	1.928	2.003
Jumlah		3.094	3.339	3.249	4.121	3.784

Sebagaimana data yang dijelaskan dari tabel di atas, diketahui bahwa selama tahun 2014 Komisi Yudisial menerima 3.784 laporan masyarakat, yang terdiri dari kategori laporan masyarakat sebanyak 1.781 laporan dan 2.003 laporan hanya berupa surat tembusan. Laporan masyarakat yang ditangani hingga tuntas adalah laporan pengaduan yang ditangani oleh Komisi Yudisial sampai pada tahap pelaksanaan sidang pleno, dimana dalam pleno tersebut, laporan yang masuk ditetapkan dengan status terbukti dan tidak terbukti dengan data realisasi sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 19
Jumlah Laporan Masyarakat Yang Ditangani Hingga Tuntas
(Berdasarkan Hasil Sidang Pleno)
Tahun 2013-2014

No	Bulan	2013			2014			Naik/ Turun
		Terbukti	Tidak Terbukti	Jml	Terbukti	Tidak Terbukti	Jml	
1	Januari	12	3	15	14	10	24	9
2	Februari	0	0	0	3	4	7	7
3	Maret	7	4	11	5	6	11	0
4	April	8	2	10	5	8	13	3
5	Mei	10	7	17	1	12	13	-4
6	Juni	0	0	0	11	13	24	24
7	Juli	9	11	20	1	8	9	-11
8	Agustus	11	6	17	2	5	7	-10
9	September	12	12	24	13	18	31	7
10	Oktober	8	7	15	8	12	20	5
11	November	0	0	0	4	7	11	11
12	Desember	21	10	31	7	19	26	-5
Total		98	62	160	74	122	196	36

Dari tabel diatas diketahui bahwa laporan masyarakat yang ditangani hingga tuntas selama tahun 2013 sebanyak 160 laporan dan tahun 2014 sebanyak 196. Sehingga terdapat peningkatan sebanyak 36 laporan atau sebesar 22,50%. Dengan demikian, Komisi Yudisial tidak berhasil mencapai target yang diharapkan yaitu peningkatan sebanyak 30%. Sehingga untuk indikator persentase (%) peningkatan laporan masyarakat yang ditangani hingga tuntas hanya memperoleh capaian sebesar 75%.

7. Persentase (%) Laporan Hasil Investigasi (LHI) Yang Dimanfaatkan Dalam Sidang Panel-Pleno

Sebagai lembaga independen yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap KEPPH, Komisi Yudisial dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan investigasi, verifikasi dan klarifikasi. Investigasi kasus pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penelusuran penyimpangan perilaku hakim sebagai usaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan keterangan yang cukup dalam rangka membuktikan ada tidaknya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim. Sampai dengan saat ini laporan hasil investigasi yang telah dihasilkan sebanyak 46 Laporan. Berdasarkan kasus dan laporan yang ditangani, maka 46 laporan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 20
Klasifikasi Kasus dan Laporan Hasil Investigasi
Tahun 2014

NO	PELANGGARAN	JUMLAH
1	Dugaan terima uang dalam penanganan perkara	9
2	Dugaan melakukan pemerasan, penggelapan, penipuan, perampasan	4
3	Dugaan gratifikasi berupa barang/fasilitas bepergian ke luar negeri	3
4	Dugaan menjalin Hubungan asmara dengan pegawai/orang lain	7
5	Dugaan melakukan Mark-up pengadaan tanah	1

NO	PELANGGARAN	JUMLAH
6	Dugaan bertemu dengan pihak berperkara	4
7	Dugaan Keberpihakan dalam menangani perkara	4
8	Dugaan Komunikasi dengan salah satu kuasa penggugat	2
9	Dugaan pungutan liar	1
10	Dugaan Praktek Mafia peradilan dan makelar kasus	2
11	Dugaan tindakan premanisme	2
12	Dugaan sakit fisik dan tidak mampu menjalankan tugas	2
13	Dugaan penanganan kasus tidak profesional	2
14	Dugaan adanya intervensi antara terdakwa	1
15	Laporan ketidakpuasan terhadap putusan dan tidak profesional	2
JUMLAH		46

Dari total 46 laporan hasil investigasi, sebanyak 28 laporan atau 60,87% sudah dibahas dalam sidang panel. Dengan demikian Komisi Yudisial hanya mencapai 76,09% dari target 80% laporan hasil investigasi (LHI) yang dimanfaatkan dalam sidang panel-pleno. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan tidak semua laporan hasil investigasi dibutuhkan untuk dibahas dalam sidang panel yang digunakan untuk melengkapi berkas laporan masyarakat. Selain itu terdapat Laporan Hasil Investigasi yang mendapatkan disposisi Ketua Bidang sebanyak 5 laporan dan 12 laporan masih menunggu jadwal sidang panel atau disposisi Ketua Bidang.

2) PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 DAN TAHUN SEBELUMNYA.

PermenPANRB Nomor 53 tahun 2014 mengamanatkan agar dalam penyusunan Laporan Kinerja senantiasa dilakukan perbandingan terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya. Pada penyusunan Laporan Kinerja di akhir periode Rencana Strategis 2010 - 2014, di mana dalam periode tersebut Rencana Strategis Komisi Yudisial mengalami penyesuaian sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial sehingga membawa konsekuensi terhadap penyesuaian formulasi sasaran strategis dan indikator kinerja yang semula pada tahun 2011 - 2013 berjumlah 6 sasaran strategis menjadi 3 sasaran strategis pada tahun 2014. Oleh karena itu, perbandingan capaian kinerja antar sasaran strategis hanya dapat dilakukan secara konsisten pada periode 2011-2013, dan terhadap capaian kinerja tahun 2014 tidak dapat secara bersama-sama disandingkan dengan capaian kinerja 3 tahun sebelumnya (2011-2013) karena terdapat penyesuaian yang signifikan atas formulasi sasaran strategis dan indikator kinerja di tahun 2014.

Ringkasan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014

No.	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja Sasaran (%)
1.	Meningkatnya Dukungan Teknis Administratif Kepada Komisi Yudisial	100,00
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana KY Secara Optimal	75,00
3.	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	71,24
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis		82,08

Sedangkan memperhatikan pencapaian kinerja sasaran strategis pada kurun waktu tahun 2011 - 2013, maka dapat disandingkan sebagai berikut:

Tabel 22
Capaian Kinerja Rata-Rata Sasaran Strategis
Tahun 2011 - 2013

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja Sasaran (%)			Indeks Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)
		2011	2012	2013	
1	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya	96,50	86,50	94,59	92,53
2	Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik	94,87	98,81	98,72	97,47
3	Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	42,50	100,00	100,00	80,83
4	Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	99,50	100,00	100,00	99,83
5	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	74,29	82,43	88,33	81,68
6	Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	50,00	76,20	79,43	68,54
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis		76,28	90,66	93,51	86,81

Upaya mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan dan profesional dilakukan melalui perumusan visi dan misi Komisi Yudisial 2010-2013 yang dijabarkan dalam enam sasaran strategis yang ditopang oleh sejumlah indikator kinerja utama.

Pencapaian kinerja pada tahun pada 2011-2013 secara umum dapat digambarkan “sangat berhasil” dilaksanakan, predikat tersebut ditunjukkan dengan angka capaian kinerja sebesar 86,81 yang merupakan rata-rata capaian keberhasilan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: 1094/M.PPN/04/2013, S-279/MK.02/2013 tanggal 5 April 2013 perihal Pagu Indikatif, Komisi Yudisial memperoleh pagu indikatif sebesar Rp73.250.700.000,00 dan kemudian berdasarkan Surat Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: 0202/M.PPN/06/2013, S-399/MK.02/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Revisi Pagu Indikatif Tahun 2014, Komisi Yudisial mendapat tambahan anggaran melalui usulan inisiatif baru sebesar Rp10.000.000.000 untuk membiayai pembentukan kantor penghubung di 6 lokasi baru dan biaya operasional 12 kantor penghubung yang terdiri dari 6 penghubung bentukan tahun 2013 dan 6 penghubung baru yang akan dibentuk tahun 2014, sehingga total pagu indikatif yang diterima menjadi sebesar Rp 83.250.700.000,00.

Dari total besaran pagu indikatif tersebut, pada tanggal 17 Juli 2013 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.02/2013 tentang Penetapan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Langkah-Langkah Penyelesaian Rencana Kerja Anggaran K/L Tahun 2014, Komisi Yudisial mendapat tambahan alokasi belanja pegawai sebesar Rp252.795.000,00, sehubungan dengan penambahan tersebut, maka total anggaran Komisi Yudisial menjadi Rp83.503.495.000,00 yang diformalkan oleh Kementerian Keuangan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2014 Nomor: DIPA-100.01.1.439479/2014.

Pada pertengahan tahun 2014 Menteri Keuangan menerbitkan surat edaran perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA 2014. Dengan adanya kebijakan ini, alokasi anggaran Komisi Yudisial tahun 2014 dikenakan pemotongan anggaran sebesar Rp 9.847.943.000,00 namun memperoleh tambahan anggaran untuk tunjangan kinerja pegawai Komisi Yudisial sebesar Rp4.064.507.000,00. Sehingga total anggaran Komisi Yudisial mengalami penurunan sebesar Rp 5.783.436.000,00 dari semula Rp 83.503.495.000,00 menjadi Rp77.720.059.000,00. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka dilakukan revisi anggaran

dengan hasil revisi berupa diterbitkannya Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014 Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2014 tanggal 22 Juli 2014 oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Sehingga alokasi anggaran KY tahun 2014 mengalami perubahan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 23
Alokasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2014
Berdasarkan Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/ Output	Anggaran Pagu Awal (Rp)	Anggaran Pagu Revisi (Rp)
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KOMISI YUDISIAL	50.049.795.000	50.334.125.000
A	Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perlengkapan Rumah Tangga Serta Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	46.735.795.000	47.322.870.000
B	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	3.314.000.000	3.011.255.000
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KY	2.516.000.000	2.453.741.000
A	Pengadaan Sarana dan Prasarana (KY)	865.112.000	865.112.000
B	Pengembangan Sistem Informasi dan Database Hakim	1.650.888.000	1.588.629.000
III	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA SELEKSI HAKIM AGUNG DAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM	30.937.700.000	24.932.193.000
A	Penyelenggaraan Investigasi Hakim, Calon Hakim, calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc	3.242.752.000	2.668.078.000
B	Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan Peningkatan Kompetensi Hakim	20.515.974.000	15.931.922.000
C	Seleksi Hakim Agung, Seleksi Hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim	7.178.974.000	6.332.193.000
TOTAL		83.503.495.000	77.720.059.000

Pelaksanaan pengelolaan anggaran dijalankan dalam koridor kebijakan lembaga yang senantiasa berfokus pada pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji. Semangat dan prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam proses pengelolaan anggaran guna mewujudkan *clean goverment* di lingkungan Komisi Yudisial.

Alokasi anggaran tahun 2014 digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, yang bersifat teknis administratif maupun teknis operasional. Terhitung sampai dengan 31 Desember 2014, Komisi Yudisial dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan total anggaran terserap Rp 75.668.152.184,00 atau mencapai 97,36% dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Tabel 24
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2014

No	Program/ Kegiatan/ Output	Anggaran Pagu Awal (Rp)	Anggaran Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KOMISI YUDISIAL	50.049.795.000	50.334.125.000	48.523.187.098	96,40
A	Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perlengkapan Rumah Tangga Serta Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	46.735.795.000	47.322.870.000	45.538.417.078	96,23
B	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	3.314.000.000	3.011.255.000	2.984.770.020	99,12

No	Program/ Kegiatan/ Output	Anggaran Pagu Awal (Rp)	Anggaran Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KY	2.516.000.000	2.453.741.000	2.430.190.288	99,04
A	Pengadaan Sarana dan Prasarana (KY)	865.112.000	865.112.000	863.018.775	99,76
B	Pengembangan Sistem Informasi dan Database Hakim	1.650.888.000	1.588.629.000	1.567.171.513	98,65
III	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA SELEKSI HAKIM AGUNG DAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM	30.937.700.000	24.932.193.000	24.714.774.798	99,13
A	Penyelenggaraan Investigasi Hakim, Calon Hakim, calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc	3.242.752.000	2.668.078.000	2.638.087.498	99,88
B	Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan Peningkatan Kompetensi Hakim	20.515.974.000	15.931.922.000	15.801.685.062	99,18
C	Seleksi Hakim Agung, Seleksi Hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim	7.178.974.000	6.332.193.000	6.275.002.238	99,10
TOTAL		83.503.495.000	77.720.059.000	75.668.152.184	97,36

Tingginya angka penyerapan yang dicapai oleh Komisi Yudisial merupakan salah satu indikasi bahwa Komisi Yudisial mampu melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan pencapaian sejumlah output sebagaimana telah ditargetkan pada awal tahun anggaran 2014. Meskipun realisasinya masih terdapat sisa anggaran

sebesar Rp 2.051.906.816,00 (2,64% dari total anggaran), hal ini tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan dan pencapaian target output dari program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Bila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, maka penyerapan anggaran tahun 2014 cukup baik. Meskipun sampai dengan laporan ini disusun, Laporan Keuangan Komisi Yudisial tahun 2014 masih dalam pemeriksaan BPK.

Tabel 25
Realisasi Anggaran Tahun 2010-2014

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase	Tidak Terserap
2009	99.779.082.000	89.237.666.378	89,44%	10,56%
2010	58.473.572.000	54.173.126.242	92,65%	7,35%
2011	79.716.292.000	68.611.548.245	86,07%	13,93%
2012	77.487.326.000	75.729.494.968	97,73%	2,27%
2013	91.588.475.000	86.467.948.133	94,41%	5,59%
2014	77.720.059.000	75.668.152.184	97,36%	2,64%



PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Komisi Yudisial tahun 2104 disamping merupakan pertanggungjawaban kinerja Komisi Yudisial dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2104, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran organisasi.

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja dan indikator kinerja utama. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan dan diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran.

Laporan Kinerja Komisi Yudisial tahun 2014 menyajikan informasi tentang realisasi pencapaian target sebagaimana dijanjikan dalam penetapan kinerja. Penyajian hasil capaian kinerja diukur berdasarkan pengelompokan indikator kinerja pada sasaran strategis dengan membandingkan antara realisasi dan target. Berdasarkan metode tersebut, diketahui hasil pencapaian target kinerja pada masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Dukungan Teknis Administratif Kepada Komisi Yudisial, mempunyai nilai capaian kinerja sebesar 100,00% atau "Sangat Berhasil";
2. Sasaran 2: Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana KY Secara Optimal, mempunyai nilai capaian kinerja sebesar 75% atau "Berhasil";
3. Sasaran 3: Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim Dengan Mengacu Pada Kode Etik dan Perilaku Hakim, mempunyai nilai capaian kinerja sebesar 71,24% atau "Berhasil";

Sehingga rata-rata pencapaian kinerja Komisi Yudisial tahun 2014 adalah sebesar 82,08% termasuk dalam kategori berhasil.

Mengacu pada 3 sasaran strategis yang diturunkan ke dalam 16 indikator, 10 indikator memiliki nilai capaian dengan range 85% - 100% atau "Sangat Berhasil", 3 indikator memiliki nilai capaian dengan range 70% - 85% atau "Berhasil", dan 3 indikator memiliki nilai capaian kurang dari 55% atau "Tidak Berhasil". Sementara pada kinerja pengelolaan anggaran 2014 dari keseluruhan anggaran sebesar Rp77.720.059.000,00 dapat terealisasi Rp 75.668.152.184,00 atau 97,36% dari total anggaran.

Agar dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun-tahun kedepan dapat lebih optimal, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dokumen Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan evaluasi agar dapat berjalan sinergis, selaras, dan terukur sehingga kinerja Komisi Yudisial dapat optimal, efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Komisi Yudisial untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Akhirnya dengan disusun Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Komisi Yudisial, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal, Laporan Kinerja ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga kontribusi Komisi Yudisial dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.



Lampiran 3 : Pengukuran Kinerja
 Kementerian / Lembaga : Komisi Yudisial Republik Indonesia
 Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
1 Meningkatkan dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial	1 Persentase (%) dokumen dan laporan yang akurat dan diterbitkan tepat waktu	%	90	94.29	100.00	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi	50,334,125,000	48,523,187,098	96.40	
	2 Persentase (%) pegawai yang dapat memenuhi target kinerja	%	95	99.19	100.00					
	3 Opini BPK	-	WTP	WTP	100.00					
	4 Skor Opini Publik mengenai kinerja KY	-	Baik	Baik	100.00					
	5 Persentase (%) kepatuhan/ketaatan pegawai terhadap kode etik pegawai	%	80	99.03	100.00					
	6 Persentase (%) kepuasan pegawai terhadap sistem dan metode kerja	%	60	61.11	100.00					
	7 Jumlah penyusunan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi di bidang yudisial	publikasi	13	13	100.00					
	8 Jumlah rata-rata pengunjung website KYRI per hari	orang/hari	350	893	100.00					
Capaian Kinerja Sasaran 1					100.00					
2 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana KY secara optimal	1 Skor survey kepuasan terhadap sarana dan prasarana yang tersedia	-	Memadai	Cukup memadai	75.00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial	2,453,741,000	2,430,190,288	99.04	
Capaian Kinerja Sasaran 2					75.00					
3 Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1 Persentase (%) kelulusan peserta pendidikan hakim yang direkomendasikan	%	100	97.56	97.56	Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	24,932,193,000	24,714,774,798	99.13	
	2 Jumlah kegiatan penyusunan metode dan tata cara rekrutmen calon hakim agung dan calon hakim <i>ad hoc</i> di Mahkamah Agung	kegiatan	3	3	100.00					
	3 Jumlah calon hakim agung dan calon hakim <i>ad hoc</i> di MA yang lulus seleksi	CHA	10	5	50.00					
	4 Persentase peningkatan jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas hakim	%	100	-	41.32					-
	5 Jumlah rekomendasi advokasi hakim	rekomendasi	10	10	100.00					

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran	Realisasi	%
	6 Persentase (%) peningkatan laporan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	%	30	22.50	75.00				
	7 Persentase (%) laporan hasil investigasi (LHI) yang dimanfaatkan dalam sidang panel-pleno	%	80	60.87	76.09				
Capaian Kinerja Sasaran 3					71.24				
TOTAL CAPAIAN KINERJA					82.08		77,720,059,000	75,668,152,184	97.36